



PEMERINTAH KABUPATEN PATI

**RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PATI**

TAHUN 2022



BUPATI PATI

KEPUTUSAN BUPATI PATI

NOMOR : 050/3057 TAHUN 2021

TENTANG

**RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PATI TAHUN 2022**

BUPATI PATI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati Tahun 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022;
17. Peraturan Bupati Pati Nomor 28 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati Tahun 2017-2022, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 119 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 28 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati Tahun 2017-2022;
18. Peraturan Bupati Pati Nomor 86 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati;
19. Peraturan Bupati Pati Nomor 36 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati sebagaimana dimaksud diktum KESATU menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati Tahun 2022.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 2 Agustus 2021



TEMBUSAN :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Pati;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 050/3057 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PATI TAHUN 2022

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Pati

Nomor : 950/3057 Tahun 2021

Tanggal : 2 Agustus 2021

**RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PATI TAHUN 2022**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati merupakan organisasi yang memiliki urusan dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. Dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah wajib membuat perencanaan dalam setiap tahunnya yang tertuang dalam rencana kerja (Renja).

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan dijadikan acuan Rencana Kerja Perangkat Daerah (OPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun kedepan.

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati Tahun 2022 dilakukan dengan memperhatikan dokumen RKPD Kabupaten Pati. Dimana RKPD Kabupaten Pati merupakan dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Pati, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan demikian RKPD Kabupaten Pati Tahun 2022 merupakan acuan dalam penyempurnaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati dalam tahun yang sama, sehingga diharapkan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati tahun 2022 memiliki sinergitas dengan program serta kegiatan guna mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pati.

Dalam Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 telah ditetapkan kinerja yang akan dicapai untuk seluruh indikator kinerja juga ditetapkan nilai kuantitatif yang dijadikan dasar pengukuran keberhasilan pada akhir periode pelaksanaannya. Rencana Kerja menjelaskan berkaitan antara kegiatan dan sasaran, kebijakan dengan programnya, dan keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 145);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 57);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 71);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 98);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

- Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 133);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 114);
 17. Peraturan Bupati Pati Nomor 86 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati;
 18. Peraturan Bupati Pati Nomor 28 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 119 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 28 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati Tahun 2017-2022;
 19. Peraturan Bupati Pati Nomor 36 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten pati Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) ini adalah sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja tahun 2022 dan terjaminnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Di samping itu untuk memberikan informasi pencapaian program kerja tahun sebelumnya berikut kendala yang menyertainya.

Tujuan Renja PD adalah sebagai kerangka acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran dan Belanja Tahun 2022. Disamping itu juga dapat digunakan untuk :

- a. Sinkronisasi program kerja antar PD agar tercipta peningkatan efisiensi, efektivitas, transparan dan akuntabilitas;
- b. Memberikan informasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022;

- c. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran PD yang telah ditetapkan pagu dana indikatifnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati Tahun 2022 sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan
- 3.4. Strategi dalam Penanganan COVID-19

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati Tahun 2020 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja tersebut meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Pada tahun 2020 merupakan tahun politik yang mana dilaksanakan pemilu serentak yaitu pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, biarpun Kabupaten Pati tidak melaksanakan Pilkada namun tetap difokuskan untuk kondusifitas wilayah baik pra, saat dan pasca Pemilukada, dan juga adanya hibah untuk organisasi kemasyarakatan serta hibah bantuan keuangan partai politik. Hasilnya dalam APBD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.658.434.000,-.

Virus corona yang mewabah dan menjadi pandemi dunia di awal tahun 2020 tidak terkecuali di Kabupaten Demak banyak mempengaruhi sendi kehidupan warga masyarakat, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan perangkat daerah tidak bisa terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Berdasarkan SKB 3 Menteri, Pemerintah Kabupaten Pati melakukan refocussing untuk penanganan covid-19 dan bantuan sosial. Pandemi covid-19 menjadi salah satu penyebab bertambahnya angka kemiskinan di Kabupaten Pati.

Sekitar bulan Maret 2020 terdapat penyesuaian/refocusing, sehingga anggaran menjadi sebesar Rp. 2.925.329.000,-, hal ini berdampak pada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan. Akhirnya dalam APBD Perubahan diajukan pengurangan dan pergeseran anggaran. Total anggaran yang dikelola oleh Badan Kesbangpol tahun 2020 setelah APBD Perubahan bulan September 2020 adalah sebesar Rp. 3.010.020.000,- yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan 6 program Non urusan dengan 27 kegiatan dan 2 program Prioritas dengan 9 kegiatan.

Hasil evaluasi Renja tahun 2020 dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan 6 program dengan pelaksanaan kegiatan sebanyak 36 kegiatan, semua kegiatan dapat dilaksanakan sesuai perencanaan. Secara umum realisasi capaian keuangan sebesar 95,24% dan untuk realisasi kinerja sebesar 90,43%, dengan predikat sangat tinggi.
2. Jumlah kegiatan tahun 2020 yang memenuhi target kinerja atau penyerapan anggaran sebesar 91-100% sebanyak 33 kegiatan, atau 91,66%, kegiatan yang memenuhi target kinerja atau penyerapan anggaran sebesar 76-90% sebanyak 2 kegiatan, atau 5,56%, sedangkan kegiatan yang berada dibawah target kinerja atau penyerapan anggaran kurang dari 75% sebanyak 1 kegiatan, atau 2,78%.
3. Untuk kegiatan Renja tahun 2020 tidak semua dapat dilaksanakan sesuai perencanaan, terdapat 3 kegiatan yang capaian kinerja 0 dan 1 kegiatan capaiannya dibawah 50%, hal ini dikarenakan penyesuaian/refocusing anggaran serta adanya pandemic covid-19 sehingga dilarang untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang banyak.
4. Untuk program kegiatan Renja tahun 2021 pelaksanaan sampai dengan posisi triwulan kedua pada akhir bulan Juni 2021 secara umum realisasi capaian keuangan atau penyerapan anggaran sebesar 71,60% dari anggaran setelah refocusing dan untuk realisasi kinerja sebesar 40%, dengan predikat penyerapan anggaran sangat tinggi sedangkan untuk realisasi kinerja menunjukkan predikat sedang.

Uraian lengkap perkegiatan yang merupakan rekapitulasi hasil pelaksanaan Renja perangkat daerah dan capaian renstra perangkat daerah dapat dilihat pada Tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2021
Kabupaten Pati

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2017-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program dan kegiatan (Renja OPD Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan					
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	05	01			Program Pelayanan administrasi Perkantoran.	Persentase kelancaran pelayanan administrasi perkantoran								
1	05	01	01	01	Persediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terlayani selama setahun.	12.100 surat	4.400 surat	2.500 surat	2.500 surat	100	2.600 surat	9.500 surat	79
1	05	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Jumlah rekening telepon, air, Pajak PBB dan listrik yang dibayarkan selama setahun.	180 rekening	72 rekening	25 rekening	37 rekening	148	25 rekening	134 rekening	74
1	05	01	01	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya layanan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	217 unit	26 unit	45 unit	57 unit	127	4 unit	87 unit	40
1	05	01	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan perzinan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah izin kendaraan dinas yang disediakan selama setahun.	96 surat izin kendaraan dinas	39 surat izin kendaraan dinas	19 surat izin kendaraan dinas	19 surat izin kendaraan dinas	100	15 surat izin kendaraan dinas	73 surat izin kendaraan dinas	76
1	05	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah layanan jasa kebersihan yang disediakan selama setahun	8.500 m2	3.400 m2	1.700 m2	1.700 m2	100	1.700 m2	6.800 m2	80

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2017-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program dan kegiatan (Renja OPD Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan					
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	05	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan selama setahun.	285 jenis	90 jenis	60 jenis	60 jenis	100	60 jenis	210 jenis	74
1	05	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan, penggandaan dan penjilidan selama setahun	268.000 lembar	108.000 lembar	54.000 lembar	54.000 lembar	100	54.000 lembar	216.000 lembar	81
1	05	01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan.	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan selama setahun.	57 unit	20 unit	12 unit	16 unit	133	12 unit	48 unit	84
1	05	01	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan selama setahun.	118 unit	2 unit	3 unit	6 unit	200	2 unit	5 unit	100
1	05	01	01	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan selama setahun	1 set gorden	-	-	-	-	-	-	-
1	05	01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan selama setahun.	10 Jenis	4 jenis	2 jenis	2 jenis	100	2 jenis	6 jenis	80

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2017-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program dan kegiatan (Renja OPD Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan					
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	05	01	01	17	Penyediaan makan dan minum	Jumlah porsi makanan dan minuman yang disajikan selama setahun	2.970 porsi	600 porsi	620 porsi	630 porsi	102	630 porsi	1.860 porsi	63
1	05	01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.	Jumlah notulen rapat koordinasi atau laporan perjalanan konsultasi ke luar daerah selama setahun.	1.850 laporan perjalanan	580 kali	200 kali	200 kali	100	200 kali	980 kali	53
1	05	01	01	19	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan	Jumlah tenaga pendukung administrasi/ teknis/ keamanan yang disediakan selama setahun.	52 orang/bulan (12 bulan)	14 orang	14 orang	14 orang	100	14 orang	42 orang	81
1	05	01	01	22	Penyediaan pendukung administrasi pengelolaan keuangan dan barang	Jumlah tenaga pendukung administrasi pengelolaan keuangan dan barang.	54 orang/bulan (12 bulan)	18 orang	11 orang	10 orang	91	9 orang	37 orang	69
1	05	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik.								
1	05	01	02	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang diadakan selama setahun	5 unit	-	2 unit	3 unit	150	2 unit	5 unit	100
1	05	01	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah komulatif perlengkapan gedung kantor yang diadakan selama setahun.	18 unit	4 unit	-	-	-	-	4 unit	22

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2017-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program dan kegiatan (Renja OPD Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan					
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	05	01	02	10	Pengadaan mebeleur	Jumlah komulatif mebeleur yang diadakan selama setahun.	8 unit	8 unit	-	-		1 unit	9 unit	113
1	05	01	02	17	Pengadaan Peralatan Komputer dan kelengkapannya	Jumlah peralatan komputer dan kelengkapannya yang diadakan selama setahun.	12 unit	3 unit	6 unit	6 unit	100	4 unit	13 unit	108
1	05	01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor selama setahun.	5 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100	1 unit	4 unit	80
1	05	01	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional selama setahun.	90 unit pemeliharaan	23 unit	3 unit	3 unit	100	3 unit	29 unit	32
1	05	01	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparat								
1	05	01	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.	Jumlah stel pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan selama	154 stel	52 stel	32 stel	32 stel	100	32 stel	116 stel	75
1	05	01	03	06	Pembinaan disiplin ASN	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek implementasi perundang-undangan	104 orang	26 orang	18 orang	18 orang	100	26 orang	70 orang	67
1	05	01	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang sesuai ketentuan (tepat waktu, valid dan up to date)								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2017-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program dan kegiatan (Renja OPD Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan					
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	05	01	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ilhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun selama setahun	10 laporan	4 laporan	2 laporan	2 laporan	100	2 laporan	8 laporan	80
1	05	01	06	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun selama setahun	20 laporan	8 laporan	4 laporan	4 laporan	100	4 laporan	16 laporan	80
1	05	01	06	05	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja (RENJA) PD dan laporan evaluasi triwulan yang disusun selama setahun	10 dokumen	4 dok	2 dok	2 dok	100	2 dok	8 dok	80
1	05	01	06	06	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)SKPD.	Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) SKPD yang disusun selama setahun	10 dokumen	4 dok	2 dok	2 dok	100	2 dok	8 dok	80
1	05	01	06	10	Penyusunan Renstra PD	Jumlah Renstra PD	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
						Jumlah Jumlah Renstra Perubahan PD	1 dokumen	-	1 dok			1 dok	1 dok	100
1	05	1	15		Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2017-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program dan kegiatan (Renja OPD Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan					
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
1	05	01	15	1	Operasional keamanan tertutup (kominda)	Peningkatan kondusifitas daerah	11 orang	11 orang	-	-	-	-	11 orang	100
1	05	01	16		Program Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Peningkatan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal								
1	05	01	16	1	Fasilitasi kegiatan forum kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Jumlah forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	40 org	40 org	-	-	-	-	40 org	100
1	05	01	16	2	Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Sesat	Jumlah konflik horizontal dimasyarakat	21 kec	21 kec	-	-	-	-	21 kec	100
1	05	01	16	3	Pemantauan Organisasi/Partai Terlarang	Jumlah kegiatan organisasi terlarang dimasyarakat	21 kec	21 kec	-	-	-	-	21 kec	100
1	05	01	17		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Peningkatan pengembangan wawasan kebangsaan								
1	05	01	17	1	Peningkatan Toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi peraturan tentang Tri Kerukunan	150 orang	150 orang	-	-	-	-	150 org	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2017-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program dan kegiatan (Renja OPD Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan					
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	05	01	17	3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur Budaya Bangsa	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur Budaya Bangsa	300 orang	300 orang	-	-	-	-	300 org	100
1	05	01	17	10	Fasilitasi kegiatan Ormas, LSM dan FKUB	Fasilitasi dewan penasehat FKUB di Kab. Pati	100 orang	100 org	-	-	-	-	100 orang	100
1	05	01	17	11	Peningkatan Toleransi Kehidupan Beragama dan nilai-nilai luhur Budaya Bangsa	Jumlah Pemuka Agama dan Tokoh masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan	900 orang	150 org	200 org	0 org	0	100 org	250 org	28
						Jumlah partisipasi masyarakat dalam sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	900 orang	150 org	200 org	0 org	0	100 org	250 org	28
1	05	01	17	12	Penyusunan data base Ormas dan LSM	Jumlah sitem data base Ormas LSM yang terupdate	4 database	1 database	1 database	1 data base	100	1 database	3 database	75
1	05	01	17			Jumlah Ormas/LSM, OKP yang termonitior	4 laporan	1 lap	1 lap	1 lap	100	1 lap	3 lap	75

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2017-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program dan kegiatan (Renja OPD Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan					
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	05	01	17	13	Pengembangan dan peningkatan wawasan kebangsaan dan nasionalisme	Jumlah SMA/SMK yang berpartisipasi dalam pengembangan dan peningkatan wasbang, serta pembangunan moral Pancasila	800 siswa SMA/SMK	400 siswa SMA/SMK	200 siswa SMA/SMK	0 siswa SMA/SMK	0	200 siswa SMA/SMK	600 siswa SMA/SMK	75
1	05	01	17	14	Sosialisasi dan pendidikan Pendahuluan Bela Negara	Jumlah SMA/SMK yang berpartisipasi dalam pendidikan pendahuluan Bela Negara	400 siswa SMA/SMK	100 siswa SMA/SMK	100 siswa SMA/SMK	0 siswa SMA/SMK	0	100 siswa SMA/SMK	200 siswa SMA/SMK	50
1	05	01	17	15	Pencegahan Paham radikal kanan radikal kiri	Jumlah dokumen rekomendasi dalam pengawasan organisasi radikal kanan dan radikal kiri	8 dokumen	2 dok	2 dok	2 dok	100	2 dok	6 dok	75
1	05	01	17	16	Koordinasi Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Rekomendasi penanggulangan gangguan keamanan	8 dokumen	2 dok	2 dok	2 dok	100	2 dok	6 dok	75
						Jumlah Tomas/Toga yang difasilitasi untuk mengikuti kegiatan wawasan kebangsaan	60 orang	20 org	20 org	0 org	0	0 org	20 org	33
1	5	1	18		Program Kemitraan Pengembangan wawasan kebangsaan	Peningkatan kemitraan dalam pengembangan wawasan kebangsaan								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2017-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program dan kegiatan (Renja OPD Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan					
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	05	1	18	2	Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan wawasan kebangsaan	Jumlah masyarakat bermental pancasila	250 orang	250 orang	-	-	-	-	250 org	100
1	05	01	18	2	Pentas seni dan Budaya Festifal, Lomba Cipta dalam Upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Jumlah Gebyar tari generasi muda persatuan kab. Pati	21 kec	21 kec	-	-	-	-	21 kec	100
1	05	01	18	11	Penyusunan data Eks G 30 S PKI	Antisipasi terjadinya konflik dan tindak kriminal di masyarakat	21 kec	21 kec	-	-	-	-	21 kec	100
1	05	01	20		Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat								
1	05	01	20	1	Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	Jumlah kegiatan penyuluhan pencegahan miras dan narkoba	200 orang	200 orang	-	-	-	-	200 org	100
1	05	01	21		Program Pendidikan Politik Masyarakat	Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat								
1	05	01	21	3	Kegiatan koordinasi forum-forum diskusi politik	Jumlah temu muka Ormas/LSM dengan Muspida di Kab. Pati	50 orang	50 orang	-	-	-	-	50 org	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2017-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program dan kegiatan (Renja OPD Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan					
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	05	01	21	4	Penyusunan data base parpol, Ormas dan LSM	Terinventarisir data base parpol, ormas dan LSM	40 org	40 org	-	-	-	-	40 org	100
1	05	01	21	6	Pendidikan Politik bagi pemilih	Peningkatan pendidikan politik bagi pemilih pemula di Kab. Pati	100 orang	-	-	-	-	-	-	-
1	05	01	21	7	Pengelolaan Administrasi Bantuan Parpol	Jumlah dokumen yang dikelola	5 dok	2 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok	4 dok	80
1	05	01	21	8	Peningkatan dan pendidikan politik bagi masyarakat	Jumlah pemilih pemula, pemilih perempuan, Ormas/LSM yang partisipasi dalam kegiatan pendidikan politik	1.900 orang	480 org	200 org	50 org	25	200 org	730 org	38
1	05	01	21	9	Penyusunan data base parpol	Jumlah sistem data base parpol yang terupdate	4 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok	3 dok	75

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Capaian kinerja merupakan informasi yang berisi ukuran kinerja yang dicapai setelah dilaksanakannya suatu program/kegiatan. Capaian kinerja harus berupa angka numerik dan berdasarkan fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya. Pelaksanaan kegiatan organisasi yang dijalankan oleh sumber daya internal seperti manusia, uang, peralatan dan metode sangat menentukan berhasil atau tidaknya pencapaian sasaran organisasi pada akhir periode pelaksanaan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilaksanakan dengan memanfaatkan data kinerja. Pelaksanaan kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Pati tahun 2020 berdasarkan LKjIP 2020 yang sudah disusun menetapkan satu sasaran strategis, dua indikator kinerja.

Pelaksanaan program/kegiatan dalam pencapaian kinerja tahun 2020 secara umum dapat dicapai dengan baik. Sampai akhir Desember 2020 pencapaian realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan 95,24%. Pencapaian hasil realisasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Pati Tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pati

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019 (thn n- 2)	Tahun 2020 (thn n- 1)	Tahun 2021 (thn n)	Tahun 2022 (thn n+1)	Tahun 2019 (thn n- 2)	Tahun 2020 (thn n- 1)	Tahun 2021 (thn n)	Tahun 2022 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	INDIKATOR TUJUAN											
1.	Prosentase Penurunan konflik sosial			80%	80%	25%	25%	25%	24,08%	25%	25%	
	INDIKATOR SASARAN											
2.	Prosentase menurunnya demonstrasi anarkis			22%	16%	5%	5%	0%	0%	0%	0%	
	INDIKATOR PROGRAM											
3.	Prosentase LSM, Ormas dan OKP yang berwawasan Pancasila dan UUD 45			0.06%	28%	19%	0.09%	10%	0%	10%	10%	Refocusing anggaran dan tidak boleh mengumpulkan orang banyak
4.	Persentase Ormas dan sekolah yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan			55%	60%	65%	70%	56%	0%	65%	70%	Refocusing anggaran dan tidak boleh mengumpulkan orang banyak
5.	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu (Pilkada,pilpres,pilkades)			75%	75%	75%	75%	80%	35%	75%	80%	Refocusing anggaran dan tidak boleh mengumpulkan orang banyak

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

2.3.1 Tingkat Kinerja dan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka pada tahun 2020 organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menggantikan Kantor Kesatuan Bangsa. Dalam hal ini di tindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 86 Tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas Kepala Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah serta membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pada tahun 2022 sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022, dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati dalam kurun waktu tahun 2017-2022, ditetapkan sasaran-sasaran sebagai berikut :

- a. Prosentase penurunan konflik sosial.
- b. Prosentase penurunan demonstrasi anarkis.

Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati adalah penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Pencapaian sasaran strategis pada tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati akan melaksanakan 5 program 5 kegiatan dan 15 sub kegiatan.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dari dinamika sosial politik yang berkembang di masyarakat Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Pati pada khususnya, maka masalah-masalah yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Pati berdasarkan tugas, pokok dan fungsi serta dalam menghadapi pandemic Covid-19 adalah :

1. Bidang Kesatuan Bangsa :
 - a. Merosotnya pemahaman, kesadaran, dan pengamalan terhadap empat konsensus kebangsaan yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika di masyarakat.
 - b. Merosotnya kesadaran terhadap pelestarian dan pengamalan nilai-nilai dan etika budaya bangsa di masyarakat.
 - c. Masih sering terjadinya kekerasan dan konflik di masyarakat, konflik sosial akibat kesenjangan ekonomi, konflik keagamaan akibat perbedaan paham keagamaan, konflik industrial yang berkaitan upah dan konflik lahan dan sumber daya alam.
2. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
 - a. Belum optimalnya proses penguatan kualitas dan kapasitas kelembagaan demokrasi
 - b. Capaian tingkat partisipasi politik masyarakat masih dibawah target nasional
 - c. Masih terjadinya konflik politik dalam pelaksanaan pemilu
 - d. Terjadi pengunduran pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, karena masa pandemi Covid 19, sehingga Dari 270 daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak 2020, terdapat 208 Kepala daerah yang akan berakhir masa jabatannya pada bulan Februari 2021 mengakibatkan adanya kekosongan Kepala Daerah.

Faktor yang penghambat bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati adalah menjamurnya Perkembangan Ormas/LSM yang berkeinginan untuk mengawasi semua aktivitas pemerintahan. Tetapi disayangkan tanpa adanya kontrol yang jelas serta minimnya Kualitas SDM sebagian Ormas/Lsm, yang pada akhirnya justru berdampak

negative dan tak searah dengan cita-cita reformasi dan memang tidak dipungkiri ada dampak positif dari Reformasi yaitu : Pertama, Mendorong kehidupan politik yang terbuka, dinamis, dan demokratis, dan Kedua, tingginya minat dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan negara (Parpol, Ormas/LSM dan Independent).

2.3.3 Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 258 menyebutkan bahwa daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Visi bupati-wakil bupati terpilih Tahun 2017-2022, ditetapkan sebagai visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pati Tahun 2017–2022 adalah: “MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN PELAYANAN PUBLIK”

Perwujudan visi pembangunan Kabupaten Pati tersebut ditempuh melalui misi pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan;
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan;
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan mengutamakan pelayanan publik;
5. Meningkatkan pemberdayaan UMKM dan pengusaha, membuka peluang investasi, dan memperluas lapangan kerja;
6. Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri.
7. Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah, mendukung pengembangan ekonomi daerah.
8. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan yaitu **misi ke-1** Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati dalam kurun tahun 2017 – 2022 menetapkan tujuan sebagai berikut : ”Mewujudkan masyarakat yang tertib memiliki kepedulian sosial dan bermartabat yang berwawasan kebangsaan”.

2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan

Adapun tantangan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten antara lain:

- a. Relatif rendahnya pemahaman generasi muda terhadap Pancasila, UUD 1945, ke-bhineka-an, NKRI, demokratisasi, revolusi karakter bangsa dan restorasi sosial budaya serta stabilitas Jawa Tengah dalam rangka memantapkan ideologi dan wawsan kebangsaan;
- b. Belum tertata-nya struktur politik, pemantapan budaya politik, dinamika politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan politik dalam negeri yang lebih demokratis;
- c. Masih terdapat konflik perebutan dala pengelolaan sumber daya alam di masyarakat sebagai dampak meningkatnya kegiatan penggalian, pertambangan dan industri;
- d. Terdapat gejala menurunnya tingkat toleransi antar umat beragama, yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antar umar beragama/penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME dalam masyarakat.
- e. Masih adanya sikap diskriminatif dari kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas di masyarakat.
- f. Masih adanya aksi dan kegiatan terorisme atau kekerasan atas nama agama akibat aktualisasi pemahaman keagamaan secara salah.

Dari tantangan diatas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati memiliki sejumlah peluang sebagai berikut:

- a. Semakin membaiknya pemahaman akan keanekaragaman budaya nilai-nilai kebangsaan yang dapat meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa;

- b. Kesadaran masyarakat untuk menjaga eksistensi bangsa melalui peningkatan wawasan kebangsaan, penanganan konflik dan peningkatan kewaspadaan dini;
- c. Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam berpolitik saat ini terus tumbuh;
- d. Semakin kuatnya kelembagaan demokrasi sebagai penampung aspirasi masyarakat;
- e. Stabilnya sistem politik sehingga memberikan ruang bagi pengembangan sistem politik yang demokratis.

2.3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Untuk menyikapi isu-isu strategis tersebut diperlukan solusi atau rekomendasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Adapun rekomendasi yang dapat diambil sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan pengamalan terhadap empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika di masyarakat.
2. Memberikan pemahaman akan pentingnya pelestarian dan pengamalan nilai-nilai dan etika budaya bangsa di masyarakat.
3. Melakukan sosialisasi terkait etika dan budaya politik demokrasi yang berdampak pada penurunan tingkat partisipasi politik masyarakat terutama pemilih pemula dan kaum wanita, baik dalam pemilu maupun proses pengambilan keputusan kebijakan publik, di masyarakat.
4. Melakukan sosialisasi di Sekolah terkait Politik Kebangsaan dengan menyoar para pemilih pemula dan anggota Rohis;
5. Memperkuat Portal Kebangsaan guna antisipasi berita bohong dan hasutan (hate speech);
6. Peningkatan penggunaan Media Sosial dalam melakukan sosialisasi nilai-nilai Pancasila; partisipasi politik dan Wawasan Kebangsaan;
7. Melakukan koordinasi terhadap instansi terkait agar tidak terjadi kekerasan dan konflik di masyarakat, baik konflik politik dalam pemilu, konflik sosial akibat kesenjangan ekonomi, konflik

keagamaan akibat perbedaan paham keagamaan, konflik industrial yang berkaitan upah, dan konflik lahan dan sumber daya alam.

8. Melakukan sosialisasi mengenai pendidikan politik kepada seluruh elemen masyarakat;
9. Koordinasi dan kerjasama antara Badan Penyelenggara Pemilu dan aparat terkait dalam rangkaantisipasi isu negatif yang berkembang;
10. Perlu tindakan tegas terhadap pelaku dugaan money politic;
11. Koordinasi antara Badan Penyelenggara Pemilu dan instansi terkait mengenai jumlah DPT.
12. Pemerintah perlu menyediakan tempat bagi masyarakat untuk dapat berekspresi dengan bebas dan tertib tanpa mengganggu kenyamanan pihak lain;
13. Lebih memperhatikan fasilitas bagi kelompok disabilitas dan lansia.
14. Kaderisasi yang baik dalam partai-partai politik sehingga dapat menghasilkan politisi-politisi yang berintegritas dan kompeten;

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan langkah awal ataupun dasar bagi setiap OPD dalam menyusun Renja OPD. Dalam rancangan awal RKPD tercantum program-program yang dijadikan pedoman perencanaan pembangunan dengan membandingkan antara program pembangunan dari Pemerintah Daerah dengan kebutuhan masyarakat setelah dilakukan analisis kebutuhan masyarakat sehingga akan menghasilkan program-program prioritas untuk dijadikan rencana pembangunan di Kabupaten Pati.

Berikut reuiu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati dapat dilihat dalam tabel dibawah:

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD/ Renstra Tahun 2022
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM										
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					8,220,730,000					6.128.521.000
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Badan Kesbangpol	Persentase Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran		3,754,730,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Badan Kesbangpol	Persentase Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran		3,281,066,000	
1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		7.000.000	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		7.000.000	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun	2 Laporan	2.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun	2 Laporan	2.000.000	
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (RKA) SKPD yang disusun	1 dokumen	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (RKA) SKPD yang disusun	1 dokumen	1.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah dokumen perubahan rencana kerja anggaran (RKA) SKPD yang disusun	1 dokumen	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah dokumen perubahan rencana kerja anggaran (RKA) SKPD yang disusun	1 dokumen	1.000.000	
1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah data kinerja yang terisi	1 laporan 4 dokumen	3.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah data kinerja yang terisi	1 laporan 4 dokumen	3.000.000	
2	Administrasi Keuangan	Badan Kesbangpol	Jumlah dokumen administrasi keuangan		1,870,161,000	Administrasi Keuangan	Badan Kesbangpol 1	Jumlah dokumen administrasi keuangan		1,858,861,000	
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Badan Kesbangpol	Jumlah dokumen administrasi penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	1.763.041.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Badan Kesbangpol	Jumlah dokumen administrasi penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	1.763.041.000	
2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Badan Kesbangpol	Jumlah dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN	6 orang	36.120.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Badan Kesbangpol	Jumlah dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN	6 orang	36.120.000	
2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8 orang	65.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8 orang	56.700.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah pelaporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 laporan	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah pelaporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 laporan	1.000.000	
2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah laporan keuangan dan laporan perkembangan kegiatan PD yang disusun	2 dokumen	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah laporan keuangan dan laporan perkembangan kegiatan PD yang disusun	2 dokumen	2.000.000	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		63.200.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		18,679,000	
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Badan Kesbangpol	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	32 stel	13.200.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Badan Kesbangpol	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	32 stel	13.200.000	
3.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Badan Kesbangpol	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	18 orang	50.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Badan Kesbangpol	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	18 orang	5.479.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah peningkatan administrasi perkantoran dan sarana prasarana perkantoran		327,191,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah peningkatan administrasi perkantoran dan sarana prasarana perkantoran		295.928.000	
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Badan Kesbangpol	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	12 unit	7.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Badan Kesbangpol	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	12 unit	8.935.000	
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Badan Kesbangpol	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 unit	30.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Badan Kesbangpol	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 unit	7.700.000	
4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Badan Kesbangpol	Jumlah bahan logistik kantor	160 galon 55 dos gelas	115.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Badan Kesbangpol	Jumlah bahan logistik kantor	160 galon 55 dos gelas	109.369.000	
			Jumlah porsi makanan dan minuman yang disajikan selama setahun	630 porsi				Jumlah porsi makanan dan minuman yang disajikan selama setahun	630 porsi		
			Jumlah alat tulis kantor yang disediakan selama setahun.	60 jenis				Jumlah alat tulis kantor yang disediakan selama setahun.	60 jenis		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Jumlah komulatif bahan logistik kantor yang disediakan selama setahun	5.460 liter				Jumlah komulatif bahan logistik kantor yang disediakan selama setahun	5.460 liter		
4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Badan Kesbangpol	Jumlah barang cetakan, penggandaan dan penjiilidan	54.000 lembar	13.691.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Badan Kesbangpol	Jumlah barang cetakan, penggandaan dan penjiilidan	54.000 lembar	12.200.000	
4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Badan Kesbangpol	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3 jenis	5.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Badan Kesbangpol	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3 jenis	3.103.000	
4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah notulen rapat koordinasi atau laporan perjalanan konsultasi ke luar daerah	320 laporan	150.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah notulen rapat koordinasi atau laporan perjalanan konsultasi ke luar daerah	320 laporan	151.021.000	
4.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah arsip dinamis	1 unit	6.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah arsip dinamis	1 unit	3.600.000	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		456.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		576.992.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Badan Kesbangpol	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 unit	270.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Badan Kesbangpol	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 unit	272.000.000	
5.2	Pengadaan Mebel	Badan Kesbangpol	Jumlah mebel	1 set	51.000.000	Pengadaan Mebel	Badan Kesbangpol	Jumlah mebel	1 set	47.795.000	
5.3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Gedung Lainnya	Badan Kesbangpol	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 unit	0	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Gedung Lainnya	Badan Kesbangpol	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 unit	197.132.000	
5.4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Badan Kesbangpol		1 unit	135.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Badan Kesbangpol		1 unit	60.065.000	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		412.148.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		408.843.000	
6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Badan Kesbangpol	Jumlah surat yang terlayani selama setahun.	2.000 surat	2.148.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Badan Kesbangpol	Jumlah surat yang terlayani selama setahun.	2.000 surat	1.560.000	
6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Badan Kesbangpol	Jumlah rekening telepon, air dan listrik yang dibayarkan selama setahun.	36 rekening	49.600.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Badan Kesbangpol	Jumlah rekening telepon, air dan listrik yang dibayarkan selama setahun.	36 rekening	75.050.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Badan Kesbangpol	Jumlah jasa layanan umum	2 org	360.400.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Badan Kesbangpol	Jumlah jasa layanan umum	2 org	332.233.000	
		Badan Kesbangpol	Jumlah tenaga pendukung administasi/teknis/keamanan yang disediakan selama setahun	14 orang			Badan Kesbangpol	Jumlah tenaga pendukung administasi/teknis/keamanan yang disediakan selama setahun	14 orang		
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah paket Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		619.030.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah paket Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		112.263.000	
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Badan Kesbangpol	Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	19 unit	76.530.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Badan Kesbangpol	Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	19 unit	45.653.000	
			Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	19 unit				Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	19 unit		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Badan Kesbangpol	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	1 unit	525.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Badan Kesbangpol	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	1 unit	34.995.000	
7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Badan Kesbangpol	Jumlah pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18 unit	17.500.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Badan Kesbangpol	Jumlah pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18 unit	31.615.000	
II.	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesbangpol	Persentase sekolah yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan		180.000.000	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesbangpol	Persentase sekolah yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan		60.000.000	
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesbangpol	Jumlah peningkatan sekolah yang mendapat pembinaan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan		180.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesbangpol	Jumlah peningkatan sekolah yang mendapat pembinaan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan		60.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Badan Kesbangpol	dokumen program kerja yang tersusun	1 dokumen	15.000.000	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Badan Kesbangpol	dokumen program kerja yang tersusun	1 dokumen	5.000.000	
1.2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Badan Kesbangpol	Jumlah data base pelajar/siswa yang berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan dan peningkatan wawasan kebangsaan serta pembangunan moral pancasila	1 dokumen	15.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Badan Kesbangpol	Jumlah data base pelajar/siswa yang berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan dan peningkatan wawasan kebangsaan serta pembangunan moral pancasila	1 dokumen	10.000.000	
1.3	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Badan Kesbangpol	Jumlah pelajar/siswa yang berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan dan peningkatan wawasan kebangsaan serta pembangunan moral pancasila	100 siswa	150.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Badan Kesbangpol	Jumlah pelajar/siswa yang berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan dan peningkatan wawasan kebangsaan serta pembangunan moral pancasila	100 siswa	45.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Jumlah pemuka agama dan tokoh masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan					Jumlah pemuka agama dan tokoh masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan			
III.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Badan Kesbangpol	jumlah peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu (pilkada, pilpres, pilkades)		2.090.000.000	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Badan Kesbangpol	jumlah peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu (pilkada, pilpres, pilkades)		1.858.485.000	
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Badan Kesbangpol	Jumlah peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu (pilkada, pilpres, pilkades)		2.090.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Badan Kesbangpol	Jumlah peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu (pilkada, pilpres, pilkades)		1.858.485.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Badan Kesbangpol	dokumen program kerja yang tersusun	1 dokumen	15.000.000	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Badan Kesbangpol	dokumen program kerja yang tersusun	1 dokumen	5.000.000	
1.2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah Sistem Data Base Papol yang terupdate	1 dokumen	25.000.000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah Sistem Data Base Papol yang terupdate	1 dokumen	10.000.000	
			Jumlah rekomendasi yang dihasilkan dari forum diskusi politik	1 laporan				Jumlah rekomendasi yang dihasilkan dari forum diskusi politik	1 laporan		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.3	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Badan Kesbangpol	jumlah pemilih pemula, pemilih perempuan, ormas/LSM yang partisipasi dalam kegiatan pendidikan politik	200 orang	1.950.000.000	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Badan Kesbangpol	jumlah pemilih pemula, pemilih perempuan, ormas/LSM yang partisipasi dalam kegiatan pendidikan politik	200 orang	1.838.485.000	
			Terlaksananya peningkatan bantuan keuangan partai politik	10 Parpol				Terlaksananya peningkatan bantuan keuangan partai politik	10 Parpol		
1.4	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah Monitoring, evaluasi dan pelaporan selama setahun	1 laporan	100.000.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah Monitoring, evaluasi dan pelaporan selama setahun	1 laporan	5.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
IV.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Badan Kesbangpol	Pertumbuhan LSM, Ormas dan OKP yang berwawasn Pancasila dan UUD 45		1.765.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Badan Kesbangpol	Pertumbuhan LSM, Ormas dan OKP yang berwawasn Pancasila dan UUD 45		823.970.000	
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesbangpol	Jumlah pertumbuhan LSM, Ormas, OKP yang mendapatkan pembinaan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan		1.765.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesbangpol	Jumlah pertumbuhan LSM, Ormas, OKP yang mendapatkan pembinaan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan		823.970.000	
1.1	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Badan Kesbangpol	dokumen program kerja yang tersusun	1 dokumen	20.000.000	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Badan Kesbangpol	dokumen program kerja yang tersusun	1 dokumen	5.000.000	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.2	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah Ormas, LSM, OKP yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan	60 orang	150.000.000	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah Ormas, LSM, OKP yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan	60 orang	798.861.000	
			Jumlah rekomendasi yang dihasilkan dari FGD dibidang ormas selama setahun	1 dokumen				Jumlah rekomendasi yang dihasilkan dari FGD dibidang ormas selama setahun	1 dokumen		
			Terlaksananya peningkatan bantuan hibah Ormas	Ormas				Terlaksananya peningkatan bantuan hibah Ormas	Ormas		
1.3	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Badan Kesbangpol	jumlah sistem data base ormas/lsm yang terupdate selama setahun	1 data base	1.595.000.000	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Badan Kesbangpol	jumlah sistem data base ormas/lsm yang terupdate selama setahun	1 data base	20.109.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
V.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Badan Kesbangpol	Pertumbuhan LSM, Ormas dan OKP yang berwawasan Pancasila dan UUD 45.		220.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Badan Kesbangpol	Pertumbuhan LSM, Ormas dan OKP yang berwawasan Pancasila dan UUD 45.		80.000.000	
1	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Badan Kesbangpol	Jumlah partisipasi masyarakat dalam sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa		220.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Badan Kesbangpol	Jumlah partisipasi masyarakat dalam sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa		80.000.000	
1.1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah Pemuka Agama dan Tokoh Masyarakat yang mengikuti Kegiatan Peningkatan Wawasan Kebangsaan	100 orang	75.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah Pemuka Agama dan Tokoh Masyarakat yang mengikuti Kegiatan Peningkatan Wawasan Kebangsaan	100 orang	30.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah partisipasi masyarakat dalam sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa		145.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah partisipasi masyarakat dalam sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa		50.000.000	
VI.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Badan Kesbangpol	Pertumbuhan LSM, Ormas dan OKP yang Berwawasn Pancasila dan UUD 45.		221.000.000	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Badan Kesbangpol	Pertumbuhan LSM, Ormas dan OKP yang Berwawasn Pancasila dan UUD 45.		25.000.000	
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesbangpol	Peningkatan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial		221.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesbangpol	Peningkatan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial		25.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Asingdan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen Rekomendasi Penanggulangan Ganguan Keamanan	1 dokumen	20.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Asingdan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen Rekomendasi Penanggulangan Ganguan Keamanan	1 dokumen	5.000.000	
1.2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, pemantauan Orang assing, tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan Serta Penanganan Konflik di Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah fasilitasi dibidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik	60 orang	135.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, pemantauan Orang assing, tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan Serta Penanganan Konflik di Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah fasilitasi dibidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik	60 orang	10.000.000	
			Jumlah fasilitasi, koordinasi intelijen, FKDM	30 orang				Jumlah fasilitasi, koordinasi intelijen, FKDM	30 orang		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.3	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Badan Kesbangpol			56.000.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Badan Kesbangpol			10.000.000	
	JUMLAH				8.220.730.000	JUMLAH				6.128.521.000	

2.5 Penelaahan Terhadap Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Melalui pelaksanaan Musrenbang diperoleh berbagai usulan terhadap kebutuhan masyarakat terhadap program pembangunan yang akan dijadikan rencana pembangunan Kabupaten Pati. Melalui forum tersebut akan diketahui apa yang menjadi kebutuhan langsung masyarakat. Namun usulan yang masuk terlalu banyak dari jumlah usulan dibandingkan dengan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan penelaahan dan prioritas terhadap usulan yang ada. Berikut Usulan Program/Kegiatan Masyarakat hasil telaah :

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Kabupaten Pati

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Pati

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Badan kesbangpol			
1.2	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Badan kesbangpol	Terlaksananya peningkatan bantuan Hibah Ormas	750.000.000	Usulan Hibah Sosial masyarakat dan Hasil Reses/ Aspirasi DPRD

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati secara struktural dibawah Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI, untuk itu arah kebijakan dari pusat pada tahun 2022 yang sesuai dengan bidang politik dan pemerintahan umum antara lain :

1. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern dan Berkarakter.
2. Program Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).
3. Ketahanan Nasional, Seni Budaya, Agama, dan Kemasyarakatan dengan indikator diarahkan pada:
 - a. Fungsi, Peran, koordinasi dan Fasilitasi berkenaan dengan organisasi/lembaga kemasyarakatan (seni, budaya, agama, dan kemasyarakatan) dan forum publik, penanganan masalah sosial, serta perumusan, implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan - kebijakan berkenaan dengan ketahanan seni budaya, agama dan kemasyarakatan.
 - b. Ketahanan ekonomi dengan indikator kinerja diarahkan pada penyusunan rumusan kebijakan berkaitan dengan ketahanan ekonomi, fasilitasi, kerja sama, pembinaan, dan pengembangan ketahanan, ekonomi serta laporan stabilitas ketersediaan kebutuhan bahan pokok masyarakat.
4. Menjaga Stabilitas keamanan Nasional melalui Penanganan Konflik Secara Humanis.
5. Konsolidasi Demokrasi melalui Peningkatan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peningkatan Pendidikan Politik di Daerah.

Dari kebijakan nasional tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati merumuskan beberapa program prioritas pada tahun 2022 antara lain :

1. Revitalisasi dan Aktualisaasi Nilai-Nilai Pancasila.
2. Pelaksanaan Perda P4GN melalui Penyusunan Perbup, Efektifitas Timdu P4GN, Sosialisasi dan Penyuluhan Perda P4GN.
3. Pengawasan Ormas serta Penguatan Timdu Pengawasan Ormas.
4. Penguatan Peran Toga, Tomas dan Ormas dalam menjaga kerukunan umat beragama.
5. Pemetaan terhadap daerah rawan konflik sosial terutama konflik SARA.
6. Penguatan Partisipasi Politik dan peningkatan peran partai politik.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan implementasi dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022 yang merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati periode tahun 2017-2022, khususnya perencanaan tahun ke-lima. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan Kabupaten Pati tahun 2022 mengacu pada RPJMD dengan visi jangka menengah Pemerintah Kabupaten Pati yaitu “Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik”. Untuk mendukung pencapaian visi dimaksud, telah ditetapkan misi-misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal;

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan;
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan;
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan mengutamakan pelayanan publik;
5. Meningkatkan pemberdayaan UMKM dan pengusaha, membuka peluang investasi, dan memperluas lapangan kerja;
6. Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri.
7. Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah, mendukung pengembangan ekonomi daerah.
8. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan yaitu **misi ke-1** Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati dalam kurun tahun 2017 – 2022 menetapkan tujuan sebagai berikut : ”Mewujudkan masyarakat yang tertib memiliki kepedulian sosial dan bermartabat yang berwawasan kebangsaan”.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati dalam kurun waktu tahun 2017-2022, ditetapkan sasaran-sasaran sebagai berikut: “Mewujudkan masyarakat yang berwawasan Pancasila dan UUD 1945”.

Pencapaian misi pembangunan jangka menengah daerah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan dalam kurun waktu tahun 2017-2022 masuk tahun ke-lima sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	sasaran	Indikator Tujuan dan sasaran	Satuan	Target
Misi 1 Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal;					
1.	Mewujudkan Masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermatahat yang berwawasan kebangsaan	Mewujudkan masyarakat yang berwawasan Pancasila dan UUD 1945	a. Prosentase Penurunan konflik sosial	%	25
			b. Prosentase menurunnya demonstrasi anarkis	%	5

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati sesuai tugas pokok dan fungsi melaksanakan 6 program 11 kegiatan dan 43 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.128.521.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- Non Urusan terdiri atas 1 program 7 kegiatan 28 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 3.002.447.000,-
- Urusan Pemerintahan Umum urusan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri atas 5 program 5 kegiatan 15 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 3.126.074.000,-

Program kegiatan tersebut tersebar secara merata di wilayah Kabupaten Pati, dengan sasaran Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Organisasi Masyarakat (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Kepemudaan (OKP), Pelajar dan Mahasiswa.

Penggunaan anggaran tersebut nantinya salah satunya dialokasikan untuk penanganan New Normal dari langkah adanya pandemi Covid-19 yang saat ini masih melanda di seluruh wilayah Indonesia salah satunya adalah Kabupaten Pati.

Pada rancangan akhir ini tidak ada perbedaan program dan kegiatan jika dibandingkan dengan rancangan awal yaitu 6 program 11 kegiatan dan 43 sub kegiatan. Sedangkan untuk pagu anggaran dari rencana awal renja sampai dengan rencana akhir renja mendapat tambahan alokasi anggaran untuk pokok pikiran dewan sebesar Rp. 200.000.000,-. Dimana anggaran dalam rancangan awal renja sebesar Rp. 5.928.521.000,- dapat tambahan reses dewan menjadi Rp. 6.128.521.000,-, pembagian anggaran ini disesuaikan dengan kemampuan daerah dimana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mendapatkan alokasi dana yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

3.4 Strategi dalam Penanganan COVID-19

Tahun 2022 dianggap sebagai tahun pemulihan COVID-19 dengan mempertimbangkan asumsi pandemi Covid-19 selesai di tahun 2022. Untuk itu dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati Tahun 2022 ini dalam pemulihan Covid-19 sesuai dengan tugas dan fungsinya fokus pada :

1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam peningkatan kondusivitas lingkungan, dengan pengaktifan kegiatan siskamling serta melibatkan TOGA/TOMAS dalam kegiatan masyarakat sebagai corong informasi dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19 serta mengantisipasi dan mewaspadaai setiap penyebaran informasi berita hoaks mengenai Covid-19.
2. Mengoptimalkan peran dan fungsi forum-forum mitra Kesatuan Bangsa dan Politik seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Forum Bela Negara, serta melibatkan tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat untuk turut serta membantu pemerintah dalam pelaksanaan pencegahan, penularan serta penanganan Corona melalui berbagai upaya yang bersifat mendidik dan tidak menimbulkan kepanikan dimasyarakat melalui penyampaian penjelasan, bimbingan, himbauan dan penyuluhan kepada masyarakat.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Dalam mengimplementasikan perencanaan, pada penjabarannya dilakukan prioritas program dan kegiatan yang dilaksanakan. Prioritas program dan kegiatan tersebut menjadi pedoman pelaksanaan fungsi OPD dalam merealisasikan perencanaan pembangunan.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya Badan Kesbangpol Kabupaten Pati hanya melaksanakan fungsi kesatuan bangsa dan politik, sedangkan fungsi lain (perlindungan masyarakat) dilaksanakan oleh OPD pelaksana fungsi ketentraman dan ketertiban masyarakat. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang kesatuan bangsa dan politik, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah (Sekda).

Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Kabupaten Pati sudah menerapkan Nomenklatur yang baru sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Program dan kegiatan terlampir). Serta sudah menerapkan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang mengacu pada Pasal 274 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, SIPD menjadi bagian integral dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan,

selanjutnya diturunkan lagi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

Tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati mendapatkan alokasi anggaran sesuai dalam RKPD Kabupaten Pati yang bersumber dari APBD Kabupaten Pati sebesar Rp 6.128.521.000,- APBD Provinsi/Bankeu Provinsi sebesar Rp 0,- dan APBN sebesar Rp 0,- dengan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022
Tahun Anggaran 2023

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM									
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									4.400.062.400
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Bakesbangpol		3,281,066,000	DAU			3,020,062,400	
8	01	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bakesbangpol		9.500.000	DAU			8.500.000	
8	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun	Bakesbangpol	2 laporan	2.000.000	DAU		2 laporan	2.500.000	
8	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (RKA) SKPD yang disusun	Bakesbangpol	1 dokumen	1.000.000	DAU		1 dokumen	1.500.000	
8	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah dokumen perubahan rencana kerja anggaran (RKA) SKPD yang disusun	Bakesbangpol	1 dokumen	1.000.000	DAU		1 dokumen	1.500.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah data kinerja yang terisi	Bakesbangpol	5 dokumen	5.500.000	DAU		5 dokumen	3.000.000
8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen administrasi keuangan	Bakesbangpol		1,858,861,000	DAU			1,911,000,000
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen administrasi penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Bakesbangpol	12 bulan	1.763.041.000	DAU		12 bulan	1.800.000.000
8	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN	Bakesbangpol	7 orang	36.120.000	DAU		7 orang	42.000.000
8	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bakesbangpol	9 orang	56.700.000	DAU		9 orang	65.000.000
						jumlah penyelesaian administrasi pengadaan barang dan jasa		1 laporan				1 laporan	
8	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah pelaporan keuangan akhir tahun yang disusun	Bakesbangpol	1 laporan	1.000.000	DAU		1 laporan	2.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan dan laporan perkembangan kegiatan PD yang disusun	Bakesbangpol	4 dokumen	2.000.000	DAU		4 dokumen	2.000.000
8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bakesbangpol		18,679,000	DAU			14.700.000
8	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Bakesbangpol	32 stel	13.200.000	DAU		32 stel	13.200.000
8	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah aparatur yang telah berhasil mengikuti bimtek selama setahun	Bakesbangpol	18 orang	5.479.000	DAU		18 orang	1.500.000
						persentase pembinaan terhadap karyawan yang melakukan pelanggaran disiplin kerja		32 orang				32 orang	
8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah peningkatan administrasi perkantoran dan sarana prasarana perkantoran	Bakesbangpol		295.928.000	DAU			313,862,400
8	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bakesbangpol	12 unit	8.935.000	DAU		12 unit	9.500.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Bakesbangpol	1 unit	7.700.000	DAU		1 unit	7.700.000
8	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor	Bakesbangpol	160 galon 55 dos gelas	109.369.000	DAU		160 galon 55 dos gelas	125.000.000
						Jumlah porsi makanan dan minuman yang disajikan selama setahun		630 porsi				630 porsi	
						Jumlah alat tulis kantor yang disediakan selama setahun.		60 jenis				60 jenis	
						Jumlah komulatif bahan logistik kantor yang disediakan selama setahun		6.460 liter				6.460 liter	
8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan, penggandaan dan penjilidan	Bakesbangpol	54.000 lembar	12.200.000	DAU		54.000 lembar	15.000.000
8	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Bakesbangpol	2 jenis	3.103.000	DAU		5 jenis	3.062.400
8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah notulen rapat koordinasi atau laporan perjalanan konsultasi ke luar daerah	Bakesbangpol	350 laporan	151.021.000	DAU		350 laporan	150.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip dinamis	Bakesbangpol	33 jenis	3.600.000	DAU		33 jenis	3.600.000
8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bakesbangpol		576.992.000	DAU			280.000.000
8	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bakesbangpol	1 unit	272.000.000	DAU		1 unit	25.000.000
8	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	Bakesbangpol	7 unit	47.795.000	DAU		7 unit	25.000.000
8	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Gedung Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bakesbangpol	1 unit	197.132.000	DAU		1 unit	200.000.000
8	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bakesbangpol	4 unit	60.065.000	DAU		4 unit	30.000.000
8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Bakesbangpol		408.843.000	DAU			392.000.000
8	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terlayani selama setahun.	Bakesbangpol	2.600 surat	1.560.000	DAU		2.600 surat	2.000.000
8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, air dan listrik yang dibayarkan selama setahun.	Bakesbangpol	49 rekening	75.050.000	DAU		49 rekening	40.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jasa layanan umum	Bakesbangpol	1.700 m2	332.233.000	DAU		1.700 m2	350.000.000
						jumlah layanan jasa kebersihan yang disediakan selama setahun		Paket 3				Paket 3	
						Jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan yang disediakan selama setahun		14 orang		DAU		14 orang	
8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah paket Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bakesbangpol		112.263.000	DAU			100.000.000
8	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Bakesbangpol	19 unit	45.653.000	DAU		19 unit	50.000.000
						Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan		19 unit				19 unit	
8	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Bakesbangpol	I unit	34.995.000	DAU		I unit	40.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bakesbangpol	18 unit	31.615.000	DAU		18 unit	10.000.000
8	01	02			PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase sekolah yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan	Bakesbangpol		60.000.000	DAU			85.000.000
8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan pementapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu (plikada, pilpres, pilkades)	Bakesbangpol		60.000.000	DAU			85.000.000
8	01	02	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	dokumen program kerja yang tersusun	Bakesbangpol	1 dokumen	5.000.000	DAU		1 dokumen	1.000.000
8	01	02	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah data base pelajar/siswa yang berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan dan peningkatan wawasan kebangsaan serta pembangunan moral pancasila	Bakesbangpol	1 laporan	10.000.000	DAU		1 laporan	15.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8	01	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	jumlah SMA/SMK yang berpartisipasi dalam pengembangan dan peningkatan wasbang, serta pembangunan moral pancasila	Bakesbangpol	200 siswa	45.000.000	DAU		200 siswa	60.000.000
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	jumlah peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu (pilkada, pilpres, pilkades)	Bakesbangpol		1.858.485.000	DAU			95.000.000
8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu (pilkada, pilpres, pilkades)	Bakesbangpol		1.858.485.000	DAU			95.000.000
8	01	03	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	dokumen program kerja yang tersusun	Bakesbangpol	1 dokumen	5.000.000	DAU		1 dokumen	10.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
8	01	03	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	jumlah dokumen perumusan kebijakan di bidang politik dalam negeri	Bakesbangpol	1 dokumen	10.000.000	DAU		1 dokumen	15.000.000	
8	01	03	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	jumlah dokumen parpol yang dikelola selama setahun	Bakesbangpol	1 dokumen	1.838.485.000	DAU		1 dokumen	60.000.000	
						meningkatnya pendidikan politik bagi masyarakat		300 orang					300 orang	
						tersalurnya bantuan keuangan parpol		10 parpol					10 parpol	
8	01	03	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Monitoring, evaluasi dan pelaporan selama setahun	Bakesbangpol	1 dokumen	5.000.000	DAU		1 dokumen	10.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Pertumbuhan LSM, Ormas dan OKP yang berwawasan Pancasila dan UUD 45	Bakesbangpol		823.970.000	DAU			1,020,000,000
8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah pertumbuhan LSM, Ormas, OKP yang mendapatkan pembinaan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Bakesbangpol		823.970.000	DAU			1,020,000,000
8	01	04	2.01	01	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	dokumen program kerja yang tersusun	Bakesbangpol	1 dokumen	5.000.000	DAU		1 dokumen	10.000.000
8	01	04	2.01	03	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	pertumbuhan ormas, lsm dan okp yang berwawasan Pancasila, dan tersalurnya hibah ormas	Bakesbangpol	60 ormas 15 ormas	798.861.000	DAU		60 ormas 15 ormas	1.000.000.000
8	01	04	2.01	04	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di DaerahAsing di Daerah	jumlah sistem data base ormas/lsm yang terupdate selama setahun	Bakesbangpol	60 Ormas/ LSM 1 dokumen	20.109.000	DAU		60 Ormas/ LSM 1 dokumen	10.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Pertumbuhan LSM, Ormas dan OKP yang berwawasan Pancasila dan UUD 45.	Bakesbangpol		80.000.000				90.000.000
8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Jumlah partisipasi masyarakat dalam sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Bakesbangpol		80.000.000				90.000.000
8	01	05	2.01	02	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	jumlah orang yang mengikuti pembinaan kesadaran akan nilai- nilai luhur budaya bangsa	Bakesbangpol	100 orang	30.000.000			100 orang	30.000.000
						peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa		100 orang				100 orang	
						tersusunnya laporan radikal kanan dan radikal kiri		1 dokumen				1 dokumen	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
8	01	05	2.01	03	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Fasilitasi kerukunan umat beragama	Bakesbangpol	60 orang	50.000.000			60 orang	60.000.000	
						jumlah fasilitasi, koordinasi intelijen, FKDM		30 orang					30 orang	
						Penyuluhan pencegahan miras dan narkoba		200 orang					200 orang	
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Pertumbuhan LSM, Ormas dan OKP yang Berwawasn Pancasila dan UUD 45.	Bakesbangpol		25.000.000	DAU			90.000.000	
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Peningkatan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	Bakesbangpol		25.000.000	DAU			90.000.000	
8	01	05	2.01	02	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Penanggulangan Gangguan Keamanan	Bakesbangpol	1 laporan	5.000.000	DAU		1 laporan	10.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8	01	05	2.01	03	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, pemantauan Orang asing, tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan Serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah fasilitasi dibidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik	Bakesbangpol	100 orang	10.000.000	DAU		100 orang	50.000.000
						laporan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan dini dan penanganan konflik		1 laporan				1 laporan	
8	01	05	2.01	04	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	meningkatkan keamanan dan ketertiban umum di daerah	Bakesbangpol	1 dokumen	10.000.000	DAU		1 dokumen	30.000.000
TOTAL									6.128.521.000				4.400.062.400

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati Tahun 2022 merupakan penjabaran dari Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 khususnya tahun 2022. Rencana kerja ini memberikan gambaran terhadap hasil evaluasi renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, tujuan dan sasaran perangkat daerah yang berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah, program dan kegiatan, serta rencana kerja dan pendanaan selama periode tahun 2022.

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan renja perangkat daerah ini perlu dilakukannya pengendalian dan evaluasi setiap triwulannya. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati Tahun 2022 ini dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati Tahun 2022.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati Tahun 2022 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati dan diiringi peran aktif stakeholder yang ada di Kabupaten Pati antara lain Instansi Vertikal, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Ormas/LSM, Partai Politik dan Aparat Keamanan. Tanpa adanya kerjasama yang harmonis maka pencapaiannya tidak akan optimal. Diharapkan semua sumber daya perangkat daerah terkait dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi kepada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja serta kinerja aparatur.



BADAN KESBANGPOL KAB. PATI
Jl. Kolonel Sugiono no. 77 Pati ☎ 0295 383231
✉ kesbangpolkabpati@gmail.com